

# **RANCANGAN STRATEGIS (RENSTRA)**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

**2021-2026**



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

#### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2021 dan berakhir pada tahun 2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat:
  - a. tujuan dan sasaran;
  - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
  - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

BAB	I	Pendahuluan
BAB	II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB	IV	Tujuan dan Sasaran
BAB	V	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	VI	Rencana, Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB	VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB	VIII	Penutup

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

### BAB IV PERUBAHAN

#### Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
- terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
  - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
  - perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 September 2021  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 28 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 232

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 19680119 198803 1 002

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Samarinda.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.....	10
2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Sekdakot Samarinda.....	64
<b>BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	73
3.2. Telaahan dan Visi, Misi dan Program KDH/WKDH Terpilih.....	78
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	78
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	78
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	79
<b>BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan.....	83
4.2 Sasaran.....	83
<b>BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi.....	85
5.2 Arah Kebijakan.....	85
<b>BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	88
<b>BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>95</b>
<b>BAB. VIII PENUTUP.....</b>	<b>97</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengerahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan dan Capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam mengimplementasikan proses penyusunan Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder dalam mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah merupakan acuan dalam penyusunan Rencanan Strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Keluarnya Permendagri tersebut akan memperkuat tugas , fungsi dan peran Kepala SKPD untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan SKPD.

### 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4579);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud ditetapkan Rencana Strategis agar Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya sampai sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagai upaya ke depan untuk :

1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahu ke depan, antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta menjamin adanya sustainability (kesinambungan) program dari waktu ke waktu;

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan Rencana Strategis adalah agar dimilikinya dokumen perencanaan selama periode tahun 2021 - 2026 yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sendiri maupun lebih jauh dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017

## **Sistematika**

Penyajian Dokumen Renstra Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II**

#### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

### **BAB IV**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V**

#### **STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI**

#### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII**

**PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Sekretariat Daerah Kota Samarinda melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda. Sekretariat Daerah Kota Samarinda merupakan unsur staf (pembantu pimpinan pemerintah daerah) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda.

##### 2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 20 Tahun 2016 tugas Pokok Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

##### 2.1.2. Fungsi

Dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Samarinda No. 20 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah Kota Samarinda mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Instansi Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### 2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Samarinda dipimpin Sekretaris Daerah dan dibantu oleh :

- A. Sekretaris Daerah;
- B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten I, membawahkan :
  - 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
    - b. Sub Bagian Administrasi Pejabat Negara dan Ketertiban Umum; dan
    - c. Sub Bagian Bina Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
  - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Keagamaan;
    - b. Sub Bagian Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
    - c. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Periwisata.
  - 3. Bagian Kerjasama dan Administrasi Wilayah, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Kerjasama;
    - b. Sub Bagian Penataan Wilayah; dan
    - c. Sub Bagian administrasi Perkotaan.
  - 4. Bagian Hukum, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
    - b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Publikasi; dan
    - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Asisten II, membawahkan :
  - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Perekonomian;
    - b. Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan
    - c. Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah.
  - 2. Bagian Infrastruktur, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
    - b. Sub Bagian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan; dan
    - c. Sub Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.



3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program
  - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
  - c. Sub Bagian Evaluasi dan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.
4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Kesekretariatan;
  - b. Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya; dan
  - c. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Konstruksi.

D. Asisten Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Asisten III, membawahkan :

1. Bagian Umum, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Rumah Tangga;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan; dan
  - c. Sub Bagian Inventarisasi dan Distribusi.
2. Bagian Organisasi, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
  - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
  - c. Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Humas;
  - b. Sub Bagian Protokol; dan
  - c. Sub Bagian Penerima Tamu.
4. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan Program Setda; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan Setda.

E. Staf Ahli; dan

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Samarinda**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda ditunjang dengan Sumber Daya aparatur sebanyak 386 orang. Yang terdiri dari PNS sebanyak 242 orang dan PTTB sebanyak 145 orang.

Secara lebih rinci dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Status	Jumlah	Golongan				Jenis Kelamin		Ket
			I	II	III	IV	L	P	
1	PNS	246	3	84	142	17	146	100	
2	PTTB	135	-	-	-	-	85	50	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

#### 2.3.1. Pelayanan Bidang Administrasi Pemerintahan dan Hukum, meliputi :

1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di Bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang meliputi tata pemerintahan dan otonomi daerah, administrasi daerah, administrasi pejabat Negara, bina administrasi kecamatan dan kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama
3. Bagian Kerjasama dan Administrasi wilayah mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang kerjasama, penataan wilayah dan administrasi perkantoran.
4. Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hokum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.

**2.3.2.** Pelayanan dibidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta BUMD.
2. Bagian Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan fungsi membantu Asisten Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic dan persandian.
3. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, admisintrasi dan sumber daya, penyusunan program, pengendalian pembangunan, evaluasi dan administrasi pelaksanaan pembangunan.
4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya pengadaan barang dan jasa.

**2.3.3.** Pelayanan dibidang Administrasi dan Umum, meliputi :

1. Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, urusan rumah tangga dan perlengkapan dilingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,

pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi.

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang penyelenggaraan kehumasan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu.
4. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan tata usaha pimpinan, kepegawaian, perencanaan program dan keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah.

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 260.000.000	Rp 275.000.000	Rp 275.000.000	Rp 300.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Organisasi
2	Laporan Evaluasi Anjab dan ABK				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 440.000.000	Rp 440.000.000	Rp 440.000.000	Rp 460.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Organisasi
3	Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan dan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000	Belum	Rp 750.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Organisasi
4	Perda SOTK/Perwali Tupoksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 300.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Organisasi
5	Unit Pelayanan Publik yang telah melaksanakan kepatuhan UU no 25 Tahun 2009				10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	30 Persen	Belum	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Organisasi

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	dengan predikat Tinggi																			
6	OPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan dan Malumat Pelayanan				10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	30 Persen	Belum	Rp 500.00 0.000	Rp 500.00 0.000	Rp 250.00 0.000	Rp 500.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Organisasi
7	Jumlah unit pelayanan publik yang memiliki nilai B				10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	30 Persen	Belum	Rp 400.00 0.000	Rp 400.00 0.000	Rp 400.00 0.000	Rp 400.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Organisasi
8	OPD yang telah menerapkan SOP				10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	30 Persen	Belum	Rp 750.00 0.000	Rp 750.00 0.000	Rp 50.000. 000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Organisasi

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	OPD yang telah menerapkan Bisnis Proses Ketatalaksanaan				10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	30 Persen	Belum	Rp 750.00 0.000	Rp 750.00 0.000	Rp 750.00 0.000	Rp 750.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Organisasi
10	Bantuan Beasiswa				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 300.00 0.000	Rp 360.00 0.000	Rp 360.00 0.000	Rp 360.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat
11	Mobilitas Calon Jemaah Haji Menuju dan Dari Embarkasi Kota Balikpapan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 1.550.0 00.000	Rp 1.550.0 00.000	Rp 770.00 0.000	Rp 1.550.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12	Lokasi Pengawasan dan Pembinaan Mahasiswa dan Pelajar Kota Samarinda Yang Berada Diluar Daerah				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 0	Rp 300.00 0.000	Rp 150.00 0.000	Rp 400.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat
13	Tim Kontingen Kota Samarinda pada Event Peninmgkatan Mutu Kualitas Peribadatan Umat Keagamaan Pada Tingkat Nasional				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 0	Rp 300.00 0.000	Rp 200.00 0.000	Rp 500.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat
14	Laporan Fasilitasi dan Pendampingan Kegiatan Majelis				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 0	Rp 500.00 0.000	Rp 500.00 0.000	Rp 500.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat



### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Ulama Kota Samarinda																			
15	Laporan Fasilitasi dan Pendampingan Kegiatan BAZNAS Kota Samarinda				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 0	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat
16	Laporan Fasilitasi dan Pendampingan Kegiatan Hari-hari Besar Nasional di Kota Samarinda				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 0	Rp 400.000.000	Rp 450.000.000	Rp 500.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17	Laporan Rakerda UKS Kota Samarinda				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 0	Rp 250.000.000	Rp 150.000.000	Rp 350.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat
18	Laporan Peningkatan Silaturahmi Pimpinan daerah dengan Masyarakat				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 672.000.000	Rp 708.000.000	Rp 708.000.000	Rp 708.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat
19	Kader Ulama yang ditingkatkan Pengetahuan Agamanya				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 425.000.000	Rp 425.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20	Peserta Pelatihan Fardhu Kipayah Se Kota Samarinda				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Belum	Rp 420.000.000	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat
21	Laporan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Nasional dilingkungan Pemerintah kota Samarinda				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 1.200.000.000	Rp 1.200.000.000	Rp 1.200.000.000	Rp 1.200.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat
22	Laporan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Samarinda Menuju MTQ Tingkat				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Belum	Rp 880.000.000	Rp 700.000.000	Rp 900.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Prop.Kaltim																			
23	Laporan Pembinaan prestasi dan pengiriman kafilah MTQ Kota Samarinda pada MTQ Tingkat Prop.Kaltim				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Belum	Rp 1.800.000.000	Rp 900.000.000	Rp 1.800.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat
24	Laporan Koordinasi dan sinkronisasi bidang Kepemudaan, Olahraga, Kesbangpol, Sosial, Kesehatan,				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 409.000.000	Rp 409.000.000	Rp 409.000.000	Rp 409.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Samarinda																			
25	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran beras Raskin/ Rastra di RTS – PM				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 200.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 300.00 0.000	Rp 350.00 0.000	Rp 400.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kesejahteraan Rakyat
26	Laporan Fasilitasi pendampingan administrasi urusan Perhubungan dan Perkim				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 200.00 0.000	Rp 200.00 0.000	Rp 200.00 0.000	Rp 400.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Infrastruktur

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
27	Laporan Fasilitas pendampingan administrasi urusan Kominfo, Persandian dan statistik				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 200.00 0.000	Rp 200.00 0.000	Rp 200.00 0.000	Rp 450.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Infrastruktur
28	Laporan Fasilitas pendampingan administrasi urusan PUPR dan Pertanahan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 200.00 0.000	Rp 200.00 0.000	Rp 200.00 0.000	Rp 400.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Infrastruktur
29	Sidak Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di kota Samarinda.				18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	Rp 200.00 0.000	Rp 200.00 0.000	Rp 300.00 0.000	Rp 150.00 0.000	Rp 400.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Perekonomian

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
30	Laporan dari hasil mengumpulkan dan menghimpun data STTUK PLN dan PDAM				18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	Rp 438.368.300	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 550.000.000	Rp 600.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Perekonomian
31	Laporan Monitoring Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KPPP) di kota samarinda.				18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	Rp 0	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 250.000.000	Rp 300.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Perekonomian
32	Laporan Triwulan Pelaksanaan Evaluasi & Monitoring Penataan PKL, Pasar Tradisional dan Pasar Modern				18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	Rp 0	Rp 0	Rp 300.000.000	Rp 350.000.000	Rp 400.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Perekonomian
33	Laporan				18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	Rp 0	Rp 0	Rp	Rp	Rp	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Perekonomian

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penetapan HET LPG 3 Kp				Kerja	Kerja	Kerja	Kerja	Kerja			200.00 0.000	250.00 0.000	300.00 0.000						
34	Laporan Triwulan Pengendalian Inflasi Daerah				18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	Rp 0	Rp 0	Rp 400.00 0.000	Rp 200.00 0.000	Rp 500.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Perekonomian
35	Laporan Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.				18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	Rp 200.00 0.000	Rp 300.00 0.000	Rp 400.00 0.000	Rp 450.00 0.000	Rp 500.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Perekonomian



### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
36	Laporan Pengumpulan Data Aset dan Laba Perusda				18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	18 Unit Kerja	Rp 200.000.000	Rp 300.000.000	Rp 400.000.000	Rp 450.000.000	Rp 500.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Perekonomian
37	OPD menyampaikan LKJIP tepat waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Rp 150.000.000	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000	Rp 400.000.000	Rp 750.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Organisasi
38	OPD yang membuat LKPIJ bernilai baik				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Belum	Rp 460.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 525.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Organisasi

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
39	OPD yang menerapkan Role Model Budaya Kerja				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Belum	Rp 420.000.000	Rp 460.000.000	Rp 460.000.000	Rp 480.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Organisasi
40	Dokumen Roadmap RB				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Belum	Belum	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Organisasi
41	Penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN				5 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	35 Persen	Belum	Rp 700.000.000	Rp 700.000.000	Rp 200.000.000	Rp 700.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Organisasi

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
42	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Belum	Belum	Rp 980.000.000	Rp 500.000.000	Rp 1.000.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Kategori hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) berdasarkan LPPD																			
43	Laporan Triwulan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 800.000.000	Rp 850.000.000	Rp 900.000.000	Rp 950.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pemerintahan dan Otonomi Daerah

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
44	Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi Implementasi (Standar Pelayanan Minimal) SPM dan Urusan Pemerintahan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum	Rp 500.000.000	Rp 550.000.000	Rp 550.000.000	Rp 550.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
45	Laporan Monitoring dan Evaluasi Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum	Rp 150.000.000	Rp 250.000.000	Rp 275.000.000	Rp 300.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pemerintahan dan Otonomi Daerah

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
46	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sesuai dengan ketentuan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum	Rp 360.000.000	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000	Rp 450.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
47	Laporan Hasil Kegiatan Forsesdasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum	Rp 50.000.000	Rp 65.000.000	Rp 10.000.000	Rp 100.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
48	Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum	Rp 170.000.000	Rp 185.000.000	Rp 150.000.000	Rp 250.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pemerintahan dan Otonomi Daerah

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
49	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang terlaksana dengan baik.				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 200.000.000	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000	Rp 1.200.000.000	Rp 1.200.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pengadaan Barang dan Jasa
50	Terkendalinya pelaksanaan pengadaan barang dan konstruksi, baik permasalahan, solusi serta menjadi bahan evaluasi dan perencanaan tahun berikutnya				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 75.000.000	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 250.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pengadaan Barang dan Jasa

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
51	Persentase paket pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya yang terlaksana dengan baik.				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 75.000.000	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 250.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pengadaan Barang dan Jasa
52	'Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 50.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pengadaan Barang dan Jasa
53	'Peserta Sosialisasi Penerapan Norma, Standar, Panduan, Manual (NSPM) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 50.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 500.000.000	Rp 1.073.550.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pengadaan Barang dan Jasa

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pemerintah Kota Samarinda																			
54	Laporan Pemantauan dan promosi Produk Unggulan Khas Daerah Kota Samarinda.				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 200.000.000	Rp 100.000.000	Rp 125.000.000	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Perekonomian
55	Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Daerah melalui Pekan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 200.000.000	Belum	Rp 150.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Perekonomian



### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Nasional KTNA																			
56	Laporan Pembentukan peningkatan ekspor dan investasi daerah (PEPIDA)				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Belum	Rp 300.000.000	Rp 350.000.000	Rp 400.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Perekonomian

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
57	Laporan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Ekonomi				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Belum	Rp 400.000.000	Rp 450.000.000	Rp 500.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Perekonomian
58	Laporan Pengembangan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Belum	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000	Rp 400.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Perekonomian

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
59	Laporan Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Pengembangan Potensi Daerah, khususnya komoditi ekspor dan investasi sebagai kekuatan ekonomi yang potensial Melalui Rakor PEPIDA dan Orientasi Lapangan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Belum	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 300.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Perekonomian

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
60	'Laporan Triwulan Kegiatan Penunjang Optimalisasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 300.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 250.000.000	Rp 1.065.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pengadaan Barang dan Jasa
61	'Laporan Triwulan Optimalisasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 200.000.000	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 585.000.000	Rp 400.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pengadaan Barang dan Jasa

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
62	Kerjasama dengan pers yang harmonis/baik				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 2.279.360.000	Rp 2.279.360.000	Rp 2.279.360.000	Rp 2.279.360.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Humas dan Protokol
63	Laporan Peningkatan Oprasional Humas dan Visualisasi				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 200.000.000	Rp 3.000.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Humas dan Protokol

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
64	SDM keprotokolan yang berkualitas				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 200.00 0.000	Rp 200.00 0.000	Rp 200.00 0.000	Rp 200.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Humas dan Protokol
65	Laporan Peningkatan Optimalisasi Kinerja Keprotokolan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 880.00 0.000	Rp 880.00 0.000	Rp 250.00 0.000	Rp 880.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Humas dan Protokol
66	Laporan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Belum	Rp 1.700.0 00.000	Rp 1.700.0 00.000	Rp 500.00 0.000	Rp 1.700.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Humas dan Protokol

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
67	Laporan Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)				75 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	Belum	Rp 200.000.000	Rp 220.000.000	Rp 240.000.000	Rp 260.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pembangunan

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
68	Laporan Monitoring dan pengawasan fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda				75 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	Rp 150.000.000	Rp 933.500.000	Rp 1.033.500.000	Rp 270.000.000	Rp 1.233.500.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pembangunan
69	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda				8 Persen	8 Persen	8 Persen	8 Persen	8 Persen	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 500.000.000	Rp 600.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pembangunan



### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Koordinasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim				8 Persen	8 Persen	8 Persen	8 Persen	8 Persen	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 500.00 0.000	Rp 600.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pembangunan
70	Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) APBD				8 Persen	8 Persen	8 Persen	8 Persen	8 Persen	Rp 116.22 2.500.	Rp 992.89 7.500	Rp 1.200.0 00.000	Rp 1.200.0 00.000	Rp 1.200.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pembangunan
71	Laporan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah				Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Rp 325.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.100.0 00.000	Rp 260.00 0.000	Rp 1.300.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pembangunan

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
72	Laporan Konsolidasi Laporan bulanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kota Samarinda				Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Rp 208.777.500	Rp 628.150.000	RP 980.000.000	Rp 450.000.000	Rp 1.180.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pembangunan
73	Peserta Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah				Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Rp 150.000.000	Rp 160.000.000	Rp 170.000.000	Rp 180.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pembangunan

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
74	Peraturan Daerah				425 Persen	500 Persen	530 Persen	570 Persen	570 Persen	Belum	Belum	Belum	Rp 250.00 0.000	Rp 1.100.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum
	Peraturan Walikota				425 Persen	500 Persen	530 Persen	570 Persen	570 Persen	Rp 150.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 250.00 0.000	Rp 1.100.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum
	Surat Keputusan				425 Persen	500 Persen	530 Persen	570 Persen	570 Persen	Rp 150.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 250.00 0.000	Rp 1.100.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah				425 Persen	500 Persen	530 Persen	570 Persen	570 Persen	Rp 150.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 250.00 0.000	Rp 1.100.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum
	Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda				425 Persen	500 Persen	530 Persen	570 Persen	570 Persen	Rp 150.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 250.00 0.000	Rp 1.100.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum
	Persentase Terlaksananya sinkronisasi dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah				425 Persen	500 Persen	530 Persen	570 Persen	570 Persen	Rp 150.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 250.00 0.000	Rp 1.100.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
75	Prosentase Penyelesaian kasus Konflik Pertanahan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 150.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.200.0 00.000	Rp 1.300.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum
	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	RP 150.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.200.0 00.000	Rp 1.300.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum
	Laporan Triwulan Pelaksanaan RANHAM				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	RP 150.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.200.0 00.000	Rp 1.300.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kelompok kadarkum yang dibentuk				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	RP 150.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.200.0 00.000	Rp 1.300.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum
	Persentase kelompok kadarkum yang dibina				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	RP 150.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.200.0 00.000	Rp 1.300.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum
76	Persentase produk hukum daerah yang disosialisasikan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	RP 200.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 150.00 0.000	Rp 1.100.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	RP 200.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 150.00 0.000	Rp 1.100.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum
	Persentase produk hukum Terdokumentasi dalam bentuk buku, CD, abstrak dan warta				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	RP 200.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 150.00 0.000	Rp 1.100.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum
	Aplikasi database produk hukum di Kota Samarinda				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	RP 200.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 150.00 0.000	Rp 1.100.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Hukum

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
77	Laporan Pelaksanaan sosialisasi kerjasama daerah				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kerjasama dan Administrasi Wilayah
78	Laporan Fasilitasi kerjasama antar lembaga dan antar daerah				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 100.000.000	Belum	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kerjasama dan Administrasi Wilayah



### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
79	Laporan Fasilitas kerjasama dalam dan luar negeri				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kerjasama dan Administrasi Wilayah
80	Laporan Fasilitas kerjasama Daerah				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 750.000.000	Belum	Rp 200.000.000	Rp 750.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kerjasama dan Administrasi Wilayah
81	Aplikasi Penyediaan data dan informasi potensi kerjasama di Kota Samarinda				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Belum	Rp 250.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kerjasama dan Administrasi Wilayah

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
82	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kerjasama				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kerjasama dan Administrasi Wilayah
83	Laporan Pelaksanaan dan pertemuan APEKSI				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 460.000.000	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000	Rp 1.700.000.000	Rp 800.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kerjasama dan Administrasi Wilayah

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
84	Laporan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum	Belum	Belum	Rp 800.000.000	Rp 1.000.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	TU
85	Segmen perbatasan antar daerah yang terselesaikan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 1.650.000.000	Rp 1.700.000.000	Rp 200.000.000	Rp 1.750.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kerjasama dan Administrasi Wilayah

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
86	Laporan Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar kecamatan dan kelurahan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 400.000.000	Rp 1.500.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kerjasama dan Administrasi Wilayah
87	Dokumen Penyusunan Profile Layanan Perkotaan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 350.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kerjasama dan Administrasi Wilayah
88	Laporan Monitoring & Evaluasi Layanan Perkotaan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 0	Belum	Rp 0	Belum	Rp 350.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Kerjasama dan Administrasi Wilayah

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
89	Laporan Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 100.000.000	Rp 900.000.000	Rp 950.000.000	Rp 200.000.000	Rp 1.000.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
90	Tagihan rekening yang dibayarkan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 3.370.000.000	Rp 3.275.000.000	Rp 3.500.000.000	Rp 2.955.250.000	Rp 4.000.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
91	Jenis alat tulis kantor				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 150.000.000	Rp 250.000.000	Rp 350.000.000	Rp 300.000.000	Rp 450.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum
92	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 175.000.000	Rp 250.000.000	Rp 300.000.000	Rp 142.500.000	Rp 500.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum
93	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 80.000.000	Rp 200.000.000	Rp 250.000.000	Rp 450.000.000	Rp 400.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
94	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 773.00 0.000	Rp 1.500.0 00.000	Rp 2.000.0 00.000	Rp 4.354.0 51.000	Rp 2.000.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum
95	Persentase Bahan Logistik yang disediakan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.500.0 00.000	Rp 1.500.0 00.000	Rp 2.000.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
96	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 2.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	TU
97	PTTB serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 5.107.005.000	Rp 5.500.000.000	Rp 5.500.000.000	Rp 5.729.530.100	Rp 5.200.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	TU



### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
98	Persentase penyediaan makanan dan minuman				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 1.359.750.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 1.306.700.000	Rp 2.500.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum
99	Persentase Tamu yang dilayani				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 1.400.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
100	Tersedianya aplikasi kearsipan				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 0	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 360.000.000	Rp 100.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	TU
101	Laporan Monitoring Kegiatan Operasional Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Belum	Belum	Belum	Rp 500.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
102	Laporan Fasilitas Analisa Peningkatan Kebutuhan Sarana/Prasarana Serta Pelayanan Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 248.778.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum
103	Laporan Optimalisasi dan Identifikasi Barang Sekretariat Daerah Kota Samarinda				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 238.485.000	Rp 500.000.000	Rp 200.000.000	Rp 500.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
104	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 1.801.337.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 3.632.600.000	Rp 2.000.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum
105	Persentase rumah dinas yang dipelihara				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 276.300.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum
106	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 2.960.790.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 1.448.730.000	Rp 3.500.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
107	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp 703.00 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 1.000.0 00.000	Rp 976.25 0.000	Rp 1.000.0 00.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum
108	Laporan Fasilitasi Analisa Peningkatan Kebutuhan Sarana/Prasarana Serta Pelayanan Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 248.77 8.000	Rp 500.00 0.000	Belum	Rp 500.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
109	Laporan Optimalisasi dan Identifikasi Barang Sekretariat Daerah Kota Samarinda				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 238.48 5.000	Rp 500.00 0.000	Belum	Rp 500.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum
110	Laporan Monitoring Kegiatan Operasional Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 253.95 8.000	Rp 500.00 0.000	Rp 500.00 0.000	Rp 500.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum
111	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya				100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 250.00 0.000	Rp 250.00 0.000	Rp 180.25 0.000	Rp 300.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Umum

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Bagian
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
112	Laporan Peningkatan pengembangan sistem laporan				62,45 Nilai	62,65 Nilai	65Nilai	68 Nilai	71 Nilai	Rp 0	Rp 200.00 0.000	Rp 200.00 0.000	Rp 150.00 0.000	Rp 400.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	TU
113	Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan				Belum	Belum	Belum	100 Persen	100 Persen	Belum	Rp 270.00 0.000	Rp 270.00 0.000	Rp 490.00 0.000	Rp 450.00 0.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	TU

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

### 2.4.1. Analisa Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dengan pencermatan/identifikasi (*scanning*) terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

1. Analisis Kekuatan (*strength*) Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang meliputi :
  - a. Visi dan misi yang jelas;
  - b. Adanya dukungan dana yang cukup;
  - c. SDM yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikan;
  - d. Komitmen atasan yang tinggi;
  - e. Landasan hukum yang mengatur kewenangan;
  - f. Adanya Tupoksi yang jelas;
  - g. Sarana dan Prasarana yang memadai;
  - h. Komitmen Pimpinan terhadap bawahan;
2. Analisis kelemahan (*Weakness*) Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang meliputi :
  - a. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang mendukung pelayanan;
  - b. Belum terbangunnya budaya kerja yang dapat merubah mindset SDM menjadi produktif;
  - c. Belum optimalnya Koordinasi dan sinergi antar unit bagian dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
  - d. Penempatan pejabat struktural yang belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan;
  - e. Sering terlambatnya penyediaan dana yang berakibat pada tidak tepatnya pelaksanaan kegiatan;
  - f. Belum terbangunnya E-Government yang memanfaatkan Teknologidan Informasi;
  - g. Kurangnya inisiatif bawahan

### 2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal



Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Analisis Peluang (*opportunities*) Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang meliputi :
  - a. Adanya anggaran yang cukup memberikan pencapaian kinerja pelayanan yang tepat dan cepat;
  - b. Berkembangan sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mempromosikan secara efektif profil Kota dan potensi disegala bidang;
  - c. Partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan cukup baik;
  - d. Posisi Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang strategis;
  - e. Dukungan Instansi Vertikal;
  - f. Adanya dukungan Pemkot dan DPRD.
2. Analisis ancaman (*threat*) Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang meliputi :
  - a. Persaingan kerja yang semakin kompetitif berkaitan dengan globalisasi;
  - b. Kurangnya pemahaman unsur terkait (Dinas, Badan, Bagian di bawah Pemkot) mengenai aturan dan kebijakan yang harus dilaksanakan;
  - c. Kurangnya koorsinasi antar Dinas, Badan dan Bagian dilingkungan Pemerintah Kota;
  - d. Tingkat urbanisasi dan pengangguran yang cukup tinggi;
  - e. Penurunan disiplin;
  - f. Terjebak pada rutinitas pekerjaan;
  - g. Pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) strategi sebagai berikut :

1. Strategi SO (memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
  - a. Mendukung kebijakan Walikota berdasarkan Perda Kota Samarinda
  - b. Mengembangkan potensi dan kemampuan staf dalam peningkatan SDM;

- c. Memanfaatkan komitmen atasan dan instansi vertikal dalam meningkatkan dan penataan tugas fungsi masing-masing;
  - d. Melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal;
  - e. Melaksanakan pengawasan secara internal (SPIP).
2. Strategi ST (memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman)
- a. Meningkatkan program-program pengembangan sumber daya manusia;
  - b. Meningkatkan inovasi program-program kerja yang terarah dan terukur;
  - c. Sosialisasi mengenai aturan, kebijakan, prosedur yang harus dilaksanakan;
  - d. Meningkatkan transparansi dan koordinasi dalam pengembangan dan penataan kelembagaan, pelayanan publik serta pengembangan ketatalaksanaan untuk mendukung reformasi birokrasi;
  - e. Menanamkan manajemen perubahan dalam merubah mindset SDM.
3. Strategi WO (meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)
- a. Penambahan sumber daya/tenaga staf yang sesuai kebutuhan organisasi;
  - b. Perbaikan tata ruang tempat/ruangan kerja dan peningkatan sarana dan prasarana kerja;
  - c. Program pengembangan SDM;
  - d. Penempatan pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya;
  - e. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - f. Penerbitan Standar Operasional Prosedur.
4. Strategi WT (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
- a. Mengoptimalkan Sumber Daya yang ada dalam upaya meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas dan fungsi masing-masing.

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		Bagian
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Belum	Rp 2.450.000.000	Rp 2.465.000.000	Rp 1.015.000.000	Rp 1.510.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Organisasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Belum	Rp 1.200.000.000	Rp 1.200.000.000	Rp 950.000.000	Rp 1.200.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Organisasi
Program Penguatan Ketatalaksanaan	Rp 40.000.000	Rp 2.350.000.000	Rp 2.350.000.000	Rp 800.000.000	Rp 750.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Organisasi
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 838.368.300	Rp 9.556.000.000	Rp 12.802.000.000	Rp 10.847.000.000	Rp 14.977.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Kesejahteraan Rakyat

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		Bagian
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Pengelolaan Aset Daerah	Rp 400.000.000	Rp 600.000.000	Rp 800.000.000	Rp 900.000.000	Rp 1.000.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Perekonomian
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Rp 150.000.000	Rp 2.080.000.000	Rp 2.660.000.000	Rp 1.860.000.000	Rp 1.755.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Organisasi
Program Penguatan Pengawasan	Belum	Rp 700.000.000	Rp 700.000.000	Rp 200.000.000	Rp 700.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Organisasi
Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas	Belum	Rp 800.000.000	Rp 1.830.000.000	Rp 1.400.000.000	Rp 1.950.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Pemerintahan dan Otonomi Daerah

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		Bagian
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Bina Pembangunan Daerah	Rp 0	Rp 650.000.000	Rp 800.000.000	Rp 825.000.000	Rp 850.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga	Rp 0	Rp 580.000.000	Rp 650.000.000	Rp 560.000.000	Rp 800.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Rp 275.000.000	Rp 800.000.000	Rp 800.000.000	Rp 1.400.000.000	Rp 1.370.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Pengadaan Barang dan Jasa
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 700.000.000	Rp 7.259.360.000	Rp 8.484.360.000	Rp 5.414.360.000	Rp 9.724.360.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Perekonomian

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		Bagian
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp 0	Rp 1.700.000.000	Rp 1.700.000.000	Rp 500.000.000	Rp 1.700.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Humas dan Protokol
Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan	Rp 266.222.500	Rp 2.126.397.500	Rp 2.453.500.000	Rp 3.090.000.000	Rp 5.953.500.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Pembangunan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 500.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 1.600.000.000	Rp 3.500.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Hukum
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp 100.000.000	Rp 4.350.000.000	Rp 3.800.000.000	Rp 4.450.000.000	Rp 4.100.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Kersama dan Administrasi Wilayah

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		Bagian
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp 600.000.000	Rp 800.000.000	Rp 800.000.000	Rp 800.000.000	Rp 1.000.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	TU
Pembinaan Dan Pengembangan Kawasan Perkotaan	Belum	Rp 3.150.000.000	Rp 3.200.000.000	Rp 950.000.000	Rp 3.600.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Kerjasama dan Administrasi Wilayah
Penataan Wilayah Adm. Penegasan Batas Daerah dan Toponimi	Rp 100.000.000	Rp 900.000.000	Rp 950.000.000	Rp 200.000.000	Rp 1.000.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 15.414.755.000	Rp 19.012.263.000	Rp 20.950.000.000	Rp 21.978.031.100	Rp 23.650.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Umum

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		Bagian
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 5.741.472.000	Rp 7.253.958.000	Rp 7.500.000.000	Rp 7.157.580.000	Rp 8.600.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Umum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 0	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 180.250.000	Rp 300.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	Umum
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 0	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 150.000.000	Rp 400.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	TU
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Rp 0	Rp 270.000.000	Rp 270.000.000	Rp 490.000.000	Rp 450.000.000	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	-	-	TU



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 digunakan metode *Analisis, Strength, Weakness, Opportunities and Threat* (SWOT), yang akan menghasilkan Analisis dan Pilihan Strategis (*Strategica Analysis and Choices*) yang merupakan asumsi-asumsi hasil analisis dan kemudian dapat digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan.

##### 3.1.1. Permasalahan Bagian Sekretariat

###### 1. Bagian Organisasi

- ✓ Banyak Perangkat Daerah yang mengajukan nama jabatan belum berpedoman pada kamus jabatan;
- ✓ Masih adanya dualisme sumber Kamus Jabatan;
- ✓ Masih belum optimalnya pelaksanaan Analisis Jabatan di setiap Perangkat Daerah;
- ✓ Tupoksi yang tertuang dalam Perwali masih multi-interpretasi;
- ✓ Terbitnya UU 23 tahun 2014 perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Perda tentang SOTK;
- ✓ Masih banyaknya Perangkat Daerah pelayanan publik yang belum ber-ISO;
- ✓ Sebagian besar unit pelayanan masih belum memiliki SP;
- ✓ SOP masih dalam proses penyusunan;
- ✓ Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah pelayanan publik yang terlihat dari hasil SKM yang masih belum baik;
- ✓ Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah pelayanan publik yang terlihat Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik;
- ✓ Belum terstandarisasinya sarana prasarana penyelenggaraan pemerintah;
- ✓ Masih rendahnya ketepatan waktu pengumpulan dokumen SAKIP;
- ✓ Masih rendahnya kesadaran pejabat atau penyelenggara Negara dalam hal penyampaian LHKPN.

2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa :
  - ✓ Sarana dan prasarana belum memadai untuk operasional kantor;
  - ✓ Perlu adanya Standar Operasional (SOP) untuk pengadaan konstruksi dan barang;
  - ✓ Perlu adanya Standar Operasional (SOP) untuk pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
  - ✓ Perlunya informasi/laporan tentang paket pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
  - ✓ Perlunya peningkatan ketrampilan dan pengetahuan personil POKJA dan personil pendukung dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa;
  - ✓ Perlunya perkembangan teknologi informasi yang memberikan kecepatan layanan data;
  - ✓ Belum adanya Standar Operasional (SOP) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat daerah Kota Samarinda.
  
3. Bagian Administrasi Pembangunan :
  - ✓ Kurang Optimalnya pelaksanaan sosialisasi anggaran berbasis kinerja;
  - ✓ Kurang optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program;
  - ✓ Kurang optimalnya administrasi laporan penyerapan anggaran pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;
  - ✓ Kurang optimalnya koordinasi permasalahan pelaksanaan pembangunan;
  - ✓ Kurang optimalnya usulan rencana pembangunan kota;
  - ✓ Kurang optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  - ✓ Kurang optimalnya pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan.
  
4. Bagian Hukum :
  - ✓ Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan produk-produk hukum daerah;
  - ✓ Belum terbentuknya Peraturan Daerah tentang prosedur dan tata cara pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pelaksanaan RANHAM yang belum optimal serta pembinaan Kadarkum dan Kelurahan sadar hukum yang belum merata;

- ✓ Tidak tersedianya fasilitas penyimpanan produk-produk hukum serta system jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang belum terintegritas.

5. Bagian Humas dan Protokol :

- ✓ Fasilitas kerja yang kurang memadai mengakibatkan keterlambatan capaian hasil kerja kegiatan;
- ✓ Sumber Daya Manusia dari sisi kualitas dan kuantitas yang kurang memadai mengakibatkan keterlambatan capaian hasil kerja kegiatan;
- ✓ Kurangnya koordinasi dari pihak Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah menghambat pada layanan informasi publik;
- ✓ Belum memadainya peralatan system jaringan sandi dan komunikasi Pemerintah Kota Samarinda;
- ✓ Masih kurangnya SDM Aparatur teknis bidang sandi dan telekomunikasi;
- ✓ Masih belum optimalnya sistem jaringan komunikasi dan peralatan sandi dan telekomunikasi;
- ✓ Masih kurang memahami uraian tugas dan fungsi dalam bidang sandi dan telekomunikasi.

6. Bagian Kerjasama dan Administrasi Wilayah

- ✓ Masih banyaknya Perangkat Daerah yang belum memahami tata cara/prosedur pelaksanaan Kerjasama;
- ✓ Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran kegiatan;
- ✓ Masih kurangnya pemahaman Sumber Daya Aparatur tentang penyusunan naskah kerjasama;
- ✓ Masih kurangnya kerjasama yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah;
- ✓ Masih rendahnya ketepatan waktu penyelesaian naskah kesepakatan dan perjanjian kerjasama;
- ✓ Masih rendahnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama

#### 7. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- ✓ Penyampaian data dukung dari perangkat daerah dalam rangka penyusunan LPPD;
- ✓ Belum optimalnya kinerja Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- ✓ Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan;
- ✓ Belum optimalnya kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan;
- ✓ Belum optimalnya penerapan SPM dan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Perangkat Daerah;
- ✓ Belum optimalnya penyelesaian masalah yang terkait dengan ketertiban umum dan penanggulangan bencana;
- ✓ Belum optimalnya Pelayanan Administrasi Negara;
- ✓ Belum optimalnya penerapan hasil kegiatan Forsesdasi;
- ✓ Belum optimalnya penataan administrasi wilayah dan Toponimi.

#### 8. Bagian Kesejahteraan Rakyat

- ✓ Banyaknya permohonan Calon penerima Bantuan Beasiswa Kaltim Cemerlang yang melalui Pemerintah Kota Samarinda;
- ✓ Besarnya resiko keberangkatan Calon jamaah Haji Kota Samarinda dan resiko pemulangan Jamaah Haji Kota Samarinda menuju dan dari Embarkasi Haji Batakan Balikpapan;
- ✓ Minimnya informasi tata cara penyampaian pertanggung jawaban terhadap penerima Hibah yang bersumber dari APBD Kota Samarinda;
- ✓ Susahnya mencari data tentang Mahasiswa dan Pelajar Kota Samarinda yang berkuliah atau bersekolah di Luar Negeri;
- ✓ Minimnya komunikasi masyarakat dengan Pimpinan Daerah;
- ✓ Minimnya Kader Ulama di Kota Samarinda;
- ✓ Minimnya Petugas Pemandi Jenazah di Kota Samarinda;
- ✓ Terlalu banyaknya jumlah permohonan bantuan Belanja Hibah oleh Rumah Ibadah se Kota Samarinda;
- ✓ Tidak tertibnya Takbir Keliling yang dilaksanakan oleh masyarakat pada malam Hari Raya Idul Fitri;

- ✓ Pengiriman Kalifah MTQ Kota Samarinda pada MTQ tingkat Prov. Kaltim;
- ✓ Kurangnya koordinasi dan keterlambatan data yang diperlukan;
- ✓ Fungsi subbag Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan KB adalah membantu Perangkat Daerah yang terkait dalam melakukan kegiatan;
- ✓ Fungsi pengkoordinasian sudah berjalan tetapi belum optimal karena kurangnya koordinasi.

#### 9. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- ✓ Belum ada laporan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pasar;
- ✓ Belum maksimalnya koordinasi antar peserta dan pemantauan pelaksanaan kegiatan promosi Kota Samarinda;
- ✓ Masih dibutuhkannya pendamping dalam kegiatan Pekan Daerah KTNA dalam rangka memfasilitasi peserta;
- ✓ Belum adanya Diversifikasi komoditi baru yang berbasis sector unggulan dalam pengembangan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi daerah (PEPIDA) Kota Samarinda;
- ✓ Ketidakstabilan harga yang disebabkan kelangkaan produksi, alur distribusi, alur distribusi dan kebijakan pemerintah;
- ✓ Kenyataannya di Pemerintah Daerah masih belum melaksanakan secara optimal penghematan pemakaian listrik, air maupun bahan bakar minyak;
- ✓ Ditemukannya pada suatu wilayah/RT keluarga Raskin yang layak untuk menerima Program Raskin namun pada kenyataannya tidak teridentifikasi;
- ✓ Masih adanya penyimpangan dilapangan mengenai pupuk bersubsidi;
- ✓ Masi belum optimalnya dalam penyampaian laporan kinerja dan perkembangan 3 Perusda.

#### 10. Bagian Tata Usaha

- ✓ Kualitas pengolahan surat menyurat masih rendah;
- ✓ Pelaksanaan administrasi pembayaran keuangan yang belum optimal;
- ✓ Belum maksimal disiplin aparatur;

- ✓ Aparatur/SDM yang belum memadai.

#### 11. Bagian Umum

- ✓ Sarana dan prasarana belum memadai.

#### 12. Bagian Infrastruktur

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1. Visi

Visi Pemerintah Kota Samarinda yaitu *"Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban"*

#### 3.2.2. Misi

Sesuai dengan harapan *"Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban"* sebagai Visi RPJMD Kota Samarinda tahun 2021 - 2026, ditetapkan 5 (lima) misi-misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi;
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern;
5. Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sekretariat Daerah Kota Samarinda *memiliki* induk Kementerian yang memberikan amanat atau arahan kebijakan bagi pengembangan Sekretariat Daerah dalam Program Perekonomian dan Pembangunan di Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pemanfaatan tata ruang kota dalam Program Perekonomian dan Pembangunan di Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, oleh karena itu *dalam Renstra ini dilakukan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*.

### 3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu Strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang telah disusun pada awal bab ini. Rumusan isu strategis dirumuskan secara umum Sekretariat Daerah maupun dirinci per bagian.

#### 1. Bagian Organisasi :

- ✓ Belum tersedianya standarisasi jabatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan nama jabatan;
- ✓ Belum adanya produk hukum daerah yang mengatur mengenai kamus jabatan;
- ✓ Belum optimalnya kapasitas Sumberdaya Aparatur dalam memahami pelaksanaan Analisis Jabatan;
- ✓ Belum optimalnya kapasitas Sumberdaya Aparatur dalam menjabarkan kewenangan dan tupoksi;
- ✓ Belum tersedianya peraturan pelaksanaan mengenai SOTK;
- ✓ Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan;
- ✓ Belum optimalnya implementasi SOP, SP dalam menunjang peningkatan kinerja pemerintah daerah;
- ✓ Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- ✓ Belum adanya Perwali yang mengatur tentang standarisasi sarana prasarana kerja dan tata hubungan kerja;
- ✓ Belum optimalnya kapasitas Sumberdaya Aparatur di Bagian Organisasi;
- ✓ Belum adanya kesadaran dalam hal pelaporan harta kekayaan.

#### 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- ✓ Peningkatan fasilitas kantor yang memadai guna menunjang kinerja yang baik;
- ✓ Optimalisasi Pelayanan Pengadaan konstruksi dan barang;
- ✓ Optimalisasi Pelayanan Pengadaan jasa konsultasi dan jasa Lainnya;

- ✓ Kebutuhan transparansi dan informasi publik tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
  - ✓ Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
  - ✓ Perkembangan pelaksanaan kegiatan pada satu SKPD menjadi informasi bagi SKPD lainnya;
  - ✓ Meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran Negara yang di belanjakan melalui pengadaan Barang/Jasa.
3. Bagian Administrasi Pembangunan
- ✓ Pelaksanaan sosialisasi anggaran berbasis kinerja seluruh bagian di Sekretariat Kota;
  - ✓ Koordinasi dengan SKPD dalam pelaksanaan program;
  - ✓ Administrasi laporan penyerapan anggaran pembangunan dari masing - masing SKPD;
  - ✓ Koordinasi permasalahan pelaksana pembangunan;
  - ✓ Kualitas usulan perencanaan pembangunan kota;
  - ✓ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  - ✓ Koordinasi Permasalahan Program Pelaksanaan Pembangunan.
4. Bagian Hukum
- ✓ Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan produk-produk hukum daerah mengenai peraturan Menteri dalam Negeri No. 1 tahun 2014 tentang produk hukum daerah hambatan dalam perancangan produk hukum daerah;
  - ✓ Belum tersedianya peraturan mengenai tata cara pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan pelaksanaan RANHAM yang belum optimal serta pembinaan kadarkum dan kelurahan sadar hukum yang belum merata;
  - ✓ ketersediaan fasilitas penyimpana produk-produk hukum serta perlunya sosialisasi dan publikasi mengenai peraturan-peraturan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat baik secara digital dalam bentuk fisik.
5. Bagian Humas dan Protokol
- ✓ Perlunya upaya yang sinergi antara Pemerintah Kota dengan Pers dari Media lokal dan Nasional untuk mensosialisasikan kebijakan-



kebijakan Pemerintah Kota ke Masyarakat agar Informasi dapat dikelola secara baik untuk mendukung proses pembangunan di Kota Samarinda;

- ✓ Belum Optimalnya Sistem Jaringan Komunikasi dan Peralatan Sandi Telekomunikasi;
- ✓ Belum tersedianya SDM Aparatur Bidang Sandi dan Telekomunikasi;
- ✓ Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam memahami menjabarkan kewenangan dan tupoksi;

6. Bagian Kerjasama dan Administrasi Wilayah

- ✓ Belum optimalnya sosialisasi PP No. 50 Th. 2007 dan Permendagri No. 22 Th. 2009 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama Daerah;
- ✓ Belum optimalnya pengadaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- ✓ Belum adanya Bimtek penyusunan naskah kerjasama;
- ✓ Belum tersedianya data Potensi Daerah yang dapat dikerjasamakan baik dalam negeri maupun luar negeri;
- ✓ Belum optimalnya kapasitas Sumberdaya Aparatur di Bagian Kerjasama;
- ✓ Belum maksimalnya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kerjasama.

7. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- ✓ Peningkatan kinerja daerah dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah;
- ✓ Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- ✓ Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- ✓ Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- ✓ Penetaan administrasi wilayah dan Toponimi.

8. Bagian Kesejahteraan Rakyat

- ✓ Karena data yang diperlukan dari beberapa Perangkat Daerah masih menunggu dari informasi atau data di lapangan;

- ✓ Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja Bagian Kesra;
  - ✓ Belum optimalnya bantuan kepada masyarakat.
9. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- ✓ Belum Optimalnya penataan PKL dan Pasar di Kota Samarinda;
  - ✓ Sinkronisasi kegiatan promosi Produk Unggulan Daerah dan UKM Kota Samarinda;
  - ✓ Belum optimalnya peserta KTNA yang mengikuti, baik petani hutan dan petani nelayan;
  - ✓ Daya saing produk yang dihasilkan daerah terutama produk untuk ekspor belum mampu bersaing;
  - ✓ Perangkat Daerah terkait belum Secara Intensif melaporkan progres kegiatan yang mendukung Program TPID;
  - ✓ Belum optimalnya dalam hal pelaporan dari instansi mengenai penghematan energi listrik dan air dilingkungan instansi / Perangkat Daerah Kota Samarinda;
  - ✓ Belum optimal dan akuratnya data penerima manfaat Raskin di kota Samarinda;
  - ✓ Belum optimalnya pengawasan dan monev mengenai harga dan penyaluran pupuk bersubsidi;
  - ✓ Belum optimalnya evaluasi kinerja yang diberikan oleh 3 Perusahaan Daerah.
10. Bagian Tata Usaha
- ✓ Kualitas pengolahan surat menyurat masih rendah;
  - ✓ Pelaksanaan administrasi pembayaran keuangan yang belum optimal;
  - ✓ Keseragaman antar masing-masing pegawai;
  - ✓ Aparatur belum memahami tupoksi pekerjaan.
11. Bagian Umum
- ✓ Sarana dan Prasarana yang masih kurang
12. Bagian Infrastruktur

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Samarinda

#### 4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi.

Adapun tujuan Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah “Terciptanya Tataan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Efektif”

Dalam penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) dan diperlukan untuk memberikan focus penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap - tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### 4.2. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran mempunyai karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas peningkatan pelayanan yang akuntabel.

Sasaran Penyelenggaraan Sekretariat Daerah Kota Samarinda akan diutamakan pada upaya tercapainya perwujudan profesional aparatur, yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan dan efisien dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan dan kemandirian daerah masyarakat Kota Samarinda. Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Sekretariat Daerah Kota Samarinda menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD;
2. Terwujudnya Peningkatan yang efektif, efisien serta akuntabel dalam memfasilitasi fungsi Kepala Daerah (KDH), Wakil Kepala Daerah (WKDH) dan Sekretaris Daerah;

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat		Nilai IPP	89	92	95	96	96
		Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik	Nilai IKM	77	88	88	88	88
2	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel		Nilai LPPD	3.35	3.4	3.45	3.5	3.55
		Meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien serta akuntabel dalam memfasilitasi fungsi KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	Jumlah fasilitas fungsi KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	4	4	4	4	4

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### **Rumusan Pernyataan Strategis dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Samarinda**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Samarinda mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

#### **5.1. Strategi**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah - langkah yang berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (*strategy focussed - management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan - tindakan tertentu, Sekretariat Daerah Kota Samarinda memiliki 2 Arah Kebijakan, yaitu :

1. Peningkatan Penyelenggara Pelayanan Publik yang Lebih Baik;
2. Peningkatan Peran dan Kinerja Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah;

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

<b>VISI</b> : Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban					
<b>MISI</b> : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi (MISI 3 RPJMD)					
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bagian
1	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik	TU dan Umum
2	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien serta akuntabel dalam memfasilitasi fungsi KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Peran dan Kinerja Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah	TU, Umum, Ortal, Humas Protokol, Pemerintahan, Kesra, Hukum, Kerjasama, Perekonomian (SDA), Pembangunan, BPBJ

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya (*bagaimana*) dengan menetapkan Program Organisasi dan Kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Administrasi Umum;
3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Program Perekonomian dan Pembangunan;

Rencana Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan dalam Pencapaian Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat diuraikan pada lampiran dalam dokumen ini.



Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Samarinda 2021 - 2026

SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										BAGIAN		
								2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
				4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
				4.01	SEKRETARIAT DAERAH					79.261.486.820		81.639.331.425		84.088.511.367		86.611.166.708		89.209.501.710		420.809.998.030		
Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat						IPP	Nilai	86	86	89		92		95		96		96		96		
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD																					
	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik		X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Nilai	76	76	77	69.380.678.370	88	71.462.098.721	88	73.605.961.683	88	75.814.140.533	88	78.088.564.749	88	368.351.444.058	
				X.XX.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	62,12 Nilai	63,92 Nilai	65,72 Nilai	100.000.000	67,52 Nilai	103.000.000	69 Nilai	106.090.000	70 Nilai	109.272.700	73 Nilai	112.550.881	73 Nilai	530.913.581	
				X.XX.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	30.900.000	8 Dokumen	31.827.000	5 Dokumen	32.781.810	8 Dokumen	33.765.264	31 Dokumen	159.274.074	Sub Keg. Baru TU
				X.XX.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	1 Dokumen	5.463.635	1 Dokumen	5.627.544	5 Dokumen	26.545.679	Sub Keg. Baru TU
				X.XX.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	1 Dokumen	5.463.635	1 Dokumen	5.627.544	5 Dokumen	26.545.679	Sub Keg. Baru TU
				X.XX.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	1 Dokumen	5.463.635	1 Dokumen	5.627.544	5 Dokumen	26.545.679	Sub Keg. Baru TU
				X.XX.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	1 Dokumen	5.463.635	1 Dokumen	5.627.544	5 Dokumen	26.545.679	Sub Keg. Baru TU
				X.XX.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.900.000	1 Dokumen	31.827.000	1 Dokumen	32.781.810	1 Dokumen	33.765.264	5 Dokumen	159.274.074	TU
				X.XX.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi		0 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000	7 Dokumen	20.600.000	7 Dokumen	21.218.000	7 Dokumen	21.854.540	7 Dokumen	22.510.176	35 Dokumen	106.182.716	Sub Keg. Baru TU
				X.XX.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	415 Jumlah Laporan	444 Jumlah Laporan	444 Jumlah Laporan	39.249.932.920	464 Jumlah Laporan	40.427.430.908	484 Jumlah Laporan	41.640.253.835	504 Jumlah Laporan	42.889.461.450	524 Jumlah Laporan	44.176.145.293	2.420 Jumlah Laporan	208.383.224.406	
				X.XX.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Yang Dibayarkan	Orang	190 Orang	194 Orang	194 Orang	29.799.883.050	194 Orang	30.693.879.542	194 Orang	31.614.695.928	194 Orang	32.563.136.806	194 Orang	33.540.030.910	970 Orang	158.211.626.235	TU
				X.XX.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan Tunjangan Non ASN Yang Dibayarkan	Orang	225 Orang	250 Orang	250 Orang	9.400.049.870	270 Orang	9.682.051.366	290 Orang	9.972.512.907	310 Orang	10.271.688.294	330 Orang	10.579.838.943	1.450 Orang	49.906.141.381	TU
				X.XX.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	51.500.000	5 Dokumen	53.045.000	5 Dokumen	54.636.350	5 Dokumen	56.275.441	25 Dokumen	265.456.791	Sub Keg. Baru TU
				X.XX.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	309.000.000	1 Laporan	318.270.000	1 Laporan	327.818.100	1 Laporan	337.652.643	5 Laporan	1.592.740.743	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	BAGIAN	
								Kondisi Awal Perencanaan		2022		2023		2024		2025		2026				
								2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
				X.XX.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	309.000.000	1 Dokumen	318.270.000	1 Dokumen	327.818.100	1 Dokumen	337.652.643	3 Dokumen	1.592.740.743	Sub Keg. Baru Umum
				X.XX.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Orang	415 Orang	444 Orang	464 Orang	1.000.000.000	488 Orang	1.030.000.000	512 Orang	1.060.900.000	536 Orang	1.092.727.000	560 Orang	1.125.508.810	2.560 Orang	5.309.135.810	
				X.XX.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Stel	415 Stel	444 Stel	444 Stel	300.000.000	464 Stel	309.000.000	484 Stel	318.270.000	504 Stel	327.818.100	524 Stel	337.652.643	2.420 Stel	1.592.740.743	Umum
				X.XX.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang	300.000.000	12 Orang	309.000.000	14 Orang	318.270.000	16 Orang	327.818.100	18 Orang	337.652.643	70 Orang	1.592.740.743	Sub Keg. Baru TU
				X.XX.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan yang disosialisasi	Peraturan	0 Peraturan	0 Peraturan	3 Peraturan	100.000.000	3 Peraturan	103.000.000	3 Peraturan	106.090.000	3 Peraturan	109.272.700	3 Peraturan	112.550.881	15 Peraturan	530.913.581	Sub Keg. Baru TU
				X.XX.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang	300.000.000	12 Orang	309.000.000	14 Orang	318.270.000	16 Orang	327.818.100	18 Orang	337.652.643	70 Orang	1.592.740.743	Sub Keg. Baru TU
				X.XX.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	8.249.937.000	6 Laporan	8.497.435.110	6 Laporan	8.752.358.163	6 Laporan	9.014.928.908	6 Laporan	9.285.376.775	30 Laporan	43.800.035.957	
				X.XX.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jenis	90 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	500.000.000	150 Jenis	515.000.000	150 Jenis	530.450.000	160 Jenis	546.363.500	175 Jenis	562.754.405	735 Jenis	2.654.567.905	Umum
				X.XX.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan	Jenis	55 Jenis	70 Jenis	70 Jenis	1.300.000.000	70 Jenis	1.339.000.000	100 Jenis	1.379.170.000	125 Jenis	1.420.545.100	150 Jenis	1.463.161.453	515 Jenis	6.901.876.553	Umum
				X.XX.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	2.500.000.000	10 Jenis	2.575.000.000	10 Jenis	2.652.250.000	10 Jenis	2.731.817.500	10 Jenis	2.813.772.025	50 Jenis	13.272.839.525	Umum
				X.XX.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Realisasi Anggaran Yang Dicitak Atau Dgandakan	Dokumen	12 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	600.000.000	15 Dokumen	618.000.000	25 Dokumen	636.540.000	25 Dokumen	655.636.200	25 Dokumen	675.305.286	105 Dokumen	3.185.481.486	Umum
				X.XX.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Rombongan Tamu Yang Berkunjung	Rombongan Tamu Yang Berkunjung	15000 Rombongan Tamu Yang Berkunjung	15000 Rombongan Tamu Yang Berkunjung	15000 Rombongan Tamu Yang Berkunjung	1.250.000.000	15.000 Rombongan Tamu Yang Berkunjung	1.287.500.000	15.000 Rombongan Tamu Yang Berkunjung	1.326.125.000	15.000 Rombongan Tamu Yang Berkunjung	1.365.908.750	15.000 Rombongan Tamu Yang Berkunjung	1.406.886.013	75.000 Rombongan Tamu Yang Berkunjung	6.636.419.763	Umum
				X.XX.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	SPPD	450 SPPD	500 SPPD	600 SPPD	2.099.937.000	600 SPPD	2.162.935.110	650 SPPD	2.227.823.163	700 SPPD	2.294.657.858	750 SPPD	2.363.497.594	3.300 SPPD	11.148.850.725	TU
				X.XX.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	17 Laporan	1.700.000.000	19 Laporan	1.751.000.000	21 Laporan	1.803.530.000	23 Laporan	1.857.635.900	25 Laporan	1.913.364.977	105 Laporan	9.025.530.877	
				X.XX.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas perorangan	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas perorangan	Unit	0 Unit	0 Unit	5 Unit	1.000.000.000	5 Unit	1.030.000.000	5 Unit	1.060.900.000	5 Unit	1.092.727.000	5 Unit	1.125.508.810	25 Unit	5.309.135.810	Sub Keg. Baru Umum
				X.XX.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	500.000.000	2 Unit	515.000.000	2 Unit	530.450.000	2 Unit	546.363.500	2 Unit	562.754.405	10 Unit	2.654.567.905	Sub Keg. Baru Umum
				X.XX.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	Unit	0 Unit	0 Unit	10 Unit	200.000.000	12 Unit	206.000.000	14 Unit	212.180.000	16 Unit	218.545.400	18 Unit	225.101.762	70 Unit	1.061.827.162	Sub Keg. Baru Umum
				X.XX.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyedia Jasa	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6.700.000.000	2 Laporan	6.901.000.000	2 Laporan	7.108.030.000	2 Laporan	7.321.270.900	2 Laporan	7.540.909.027	10 Laporan	35.571.209.927	
				X.XX.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Yang Dibayarkan	Bukti Pembayaran	900 Bukti Pembayaran	900 Bukti Pembayaran	900 Bukti Pembayaran	4.200.000.000	900 Bukti Pembayaran	4.326.000.000	900 Bukti Pembayaran	4.455.780.000	900 Bukti Pembayaran	4.589.453.400	900 Bukti Pembayaran	4.727.137.002	4.500 Bukti Pembayaran	22.298.370.402	Umum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	BAGIAN	
								Kondisi Awal Perencanaan		2022		2023		2024		2025		2026				
								2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
				X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum	Bukti Pembayaran	10 Bukti Pembayaran	10 Bukti Pembayaran	10 Bukti Pembayaran	2.500.000.000	10 Bukti Pembayaran	2.575.000.000	10 Bukti Pembayaran	2.652.250.000	10 Bukti Pembayaran	2.731.817.500	10 Bukti Pembayaran	2.813.772.025	50 Bukti Pembayaran	13.272.839.525	Umum
				X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	7.700.000.000	4 Laporan	7.931.000.000	4 Laporan	8.168.930.000	4 Laporan	8.413.997.900	4 Laporan	8.666.417.837	20 Laporan	40.880.345.737	
				X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit	0 Unit	0 Unit	85 Unit	2.850.000.000	85 Unit	2.935.500.000	85 Unit	3.023.565.000	85 Unit	3.114.271.950	85 Unit	3.207.700.109	425 Unit	15.131.037.059	Sub Keg. Baru Umum
				X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit	650.000.000	16 Unit	669.500.000	16 Unit	689.585.000	16 Unit	710.272.550	16 Unit	731.580.727	80 Unit	3.450.938.277	Umum
				X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung	Gedung	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	2.700.000.000	4 Gedung	2.781.000.000	4 Gedung	2.864.430.000	4 Gedung	2.950.362.900	4 Gedung	3.038.873.787	20 Gedung	14.334.666.687	Umum
				X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jenis	1200 Jenis	1200 Jenis	1200 Jenis	1.500.000.000	1.200 Jenis	1.545.000.000	1.200 Jenis	1.591.350.000	1.200 Jenis	1.639.090.500	1.200 Jenis	1.688.263.215	6.000 Jenis	7.963.703.715	Umum
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel						Nilai LPPD	Nilai	3,275	3,3	3,35		3,4		3,45		3,5		3,55		3,55		
Terwujudnya Peningkatan yang efektif, efisien serta akuntabel dalam memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah																						
		Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Peran dan Kinerja Lembaga Pengelola Keuangan Daerah	4.01.01	Program Administrasi Umum	Nilai AKIP	Nilai	62,12 Nilai	63,92 Nilai	65,72 Nilai	4.380.808.450	67,52 Nilai	4.512.232.704	69 Nilai	4.647.599.685	70 Nilai	4.787.027.675	73 Nilai	4.930.638.505	73 Nilai	23.258.307.019	
				X.XX.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3.130.808.450	3 Laporan	3.224.732.704	3 Laporan	3.321.474.685	3 Laporan	3.421.118.925	3 Laporan	3.523.752.493	15 Laporan	16.621.887.256	
				X.XX.01.2.11.01	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang	Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	1.573.468.050	2 Orang	1.620.672.092	2 Orang	1.669.292.254	2 Orang	1.719.371.022	2 Orang	1.770.952.153	10 Orang	8.353.755.570	TU
				X.XX.01.2.11.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH WKDH yang medical Check Up	Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	237.600.000	4 Orang	244.728.000	4 Orang	252.069.840	4 Orang	259.631.935	4 Orang	267.420.893	20 Orang	1.261.450.668	TU
				X.XX.01.2.11.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang	Orang	280 Orang	300 Orang	300 Orang	1.319.740.400	350 Orang	1.359.332.612	400 Orang	1.400.112.590	450 Orang	1.442.115.968	500 Orang	1.485.379.447	2.000 Orang	7.006.681.018	TU
				X.XX.01.2.12	Kegiatan Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Laporan Kebutuhan Rumah Tangga	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	309.000.000	3 Laporan	318.270.000	3 Laporan	327.818.100	3 Laporan	337.652.643	15 Laporan	1.592.740.743	
				X.XX.01.2.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Jenis Kebutuhan Kepala Daerah	Jenis Kebutuhan	2 Jenis Kebutuhan	2 Jenis Kebutuhan	2 Jenis Kebutuhan	100.000.000	2 Jenis Kebutuhan	103.000.000	2 Jenis Kebutuhan	106.090.000	2 Jenis Kebutuhan	109.272.700	2 Jenis Kebutuhan	112.550.881	10 Jenis Kebutuhan	530.913.581	Umum
				X.XX.01.2.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Kebutuhan Wakil Kepala Daerah	Jenis Kebutuhan	2 Jenis Kebutuhan	2 Jenis Kebutuhan	2 Jenis Kebutuhan	100.000.000	2 Jenis Kebutuhan	103.000.000	2 Jenis Kebutuhan	106.090.000	2 Jenis Kebutuhan	109.272.700	2 Jenis Kebutuhan	112.550.881	10 Jenis Kebutuhan	530.913.581	Umum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	BAGIAN	
								Kondisi Awal Perencanaan		2022		2023		2024		2025		2026				
								2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
				X.XX.01.2.12.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Jenis Kebutuhan Sekretariat Daerah	Jenis Kebutuhan	2 Jenis Kebutuhan	2 Jenis Kebutuhan	2 Jenis Kebutuhan	100.000.000	2 Jenis Kebutuhan	103.000.000	2 Jenis Kebutuhan	106.090.000	2 Jenis Kebutuhan	109.272.700	2 Jenis Kebutuhan	112.550.881	10 Jenis Kebutuhan	530.913.581	Umum
				X.XX.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	515.000.000	5 Dokumen	530.450.000	5 Dokumen	546.363.500	5 Dokumen	562.754.405	25 Dokumen	2.654.567.905	
				X.XX.01.2.13.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah laporan Pengelolan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	103.000.000	1 Laporan	106.090.000	1 Laporan	109.272.700	1 Laporan	112.550.881	5 Laporan	530.913.581	Ortal
				X.XX.01.2.13.02	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	103.000.000	1 Laporan	106.090.000	1 Laporan	109.272.700	1 Laporan	112.550.881	5 Laporan	530.913.581	
				X.XX.01.2.13.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Peningkatan Kinerja dan Reformasi	Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	100.000.000	47 Perangkat Daerah	103.000.000	47 Perangkat Daerah	106.090.000	47 Perangkat Daerah	109.272.700	47 Perangkat Daerah	112.550.881	235 Perangkat Daerah	530.913.581	
				X.XX.01.2.13.04	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	103.000.000	1 Laporan	106.090.000	1 Laporan	109.272.700	1 Laporan	112.550.881	5 Laporan	530.913.581	Sub Keg. Baru Ortal
				X.XX.01.2.13.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	103.000.000	1 Laporan	106.090.000	1 Laporan	109.272.700	1 Laporan	112.550.881	5 Laporan	530.913.581	
				X.XX.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	463.500.000	3 Dokumen	477.405.000	3 Dokumen	491.727.150	3 Dokumen	506.478.965	15 Dokumen	2.389.111.115	
				X.XX.01.2.14.01	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Fasilitas Keprotokolan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	154.500.000	1 Laporan	159.135.000	1 Laporan	163.909.050	1 Laporan	168.826.322	5 Laporan	796.370.372	Humas & Protokol
				X.XX.01.2.14.02	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitas Komunikasi	Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	150.000.000	1.000 Laporan	154.500.000	1.000 Laporan	159.135.000	1.000 Laporan	163.909.050	1.000 Laporan	168.826.322	5.000 Laporan	796.370.372	
				X.XX.01.2.14.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	150.000.000	500 Laporan	154.500.000	500 Laporan	159.135.000	500 Laporan	163.909.050	500 Laporan	168.826.322	2.500 Laporan	796.370.372	
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel						Nilai LPPD	Nilai	3,275	3,3	3,35		3,4		3,45		3,5		3,55		3,55		
Terwujudnya Peningkatan yang efektif, efisien serta akuntabel dalam memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah																						
		Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik	4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD Pemerintah Kota	Nilai	3,275 Nilai	3,3 Nilai	3,35 Nilai	4.100.000.000	3,4 Nilai	4.223.000.000	3,45 Nilai	4.349.690.000	3,5 Nilai	4.480.180.700	3,55 Nilai	4.614.586.121	3,55 Nilai	21.767.456.821	
				4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	309.000.000	3 Dokumen	318.270.000	3 Dokumen	327.818.100	3 Dokumen	337.652.643	15 Dokumen	1.592.740.743	
				4.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Laporan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	103.000.000	4 Laporan	106.090.000	4 Laporan	109.272.700	4 Laporan	112.550.881	20 Laporan	530.913.581	Pemerintahan
				4.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	103.000.000	1 Laporan	106.090.000	1 Laporan	109.272.700	1 Laporan	112.550.881	5 Laporan	530.913.581	
				4.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Laporan	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	103.000.000	1 Laporan	106.090.000	1 Laporan	109.272.700	1 Laporan	112.550.881	5 Laporan	530.913.581	Sub Keg. Baru Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	BAGIAN	
								Kondisi Awal Perencanaan		2022		2023		2024		2025		2026				
								2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
								(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)			(28)
				4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3.200.000.000	3 Dokumen	3.296.000.000	3 Dokumen	3.394.880.000	3 Dokumen	3.496.726.400	3 Dokumen	3.601.628.192	15 Dokumen	16.989.234.592	
				4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000.000	12 Laporan	3.090.000.000	12 Laporan	3.182.700.000	12 Laporan	3.278.181.000	12 Laporan	3.376.526.430	60 Laporan	15.927.407.430	Kesra
				4.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000	3 Laporan	103.000.000	4 Laporan	106.090.000	4 Laporan	109.272.700	4 Laporan	112.550.881	17 Laporan	530.913.581	
				4.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	103.000.000	4 Laporan	106.090.000	4 Laporan	109.272.700	4 Laporan	112.550.881	20 Laporan	530.913.581	
				4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	309.000.000	3 Dokumen	318.270.000	3 Dokumen	327.818.100	3 Dokumen	337.652.643	15 Dokumen	1.592.740.743	
				4.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Laporan	513 Laporan	513 Laporan	513 Laporan	100.000.000	600 Laporan	103.000.000	650 Laporan	106.090.000	700 Laporan	109.272.700	700 Laporan	112.550.881	3.163 Laporan	530.913.581	Hukum
				4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Laporan Fasilitas Bantuan Hukum	Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100.000.000	24 Laporan	103.000.000	30 Laporan	106.090.000	30 Laporan	109.272.700	35 Laporan	112.550.881	143 Laporan	530.913.581	
				4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	Jumlah Laporan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	Laporan	513 Laporan	513 Laporan	513 Laporan	100.000.000	600 Laporan	103.000.000	650 Laporan	106.090.000	700 Laporan	109.272.700	700 Laporan	112.550.881	3.163 Laporan	530.913.581	
				4.01.02.2.04	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	309.000.000	3 Dokumen	318.270.000	3 Dokumen	327.818.100	3 Dokumen	337.652.643	15 Dokumen	1.592.740.743	
				4.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Laporan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	MoU, SPK	18 MoU, SPK	18 MoU, SPK	18 MoU, SPK	100.000.000	22 MoU, SPK	103.000.000	23 MoU, SPK	106.090.000	23 MoU, SPK	109.272.700	28 MoU, SPK	112.550.881	114 MoU, SPK	530.913.581	Kejasama
				4.01.02.2.04.02	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Laporan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	MoU, SPK dan NPHD	0 MoU, SPK dan NPHD	0 MoU, SPK dan NPHD	2 MoU, SPK dan NPHD	100.000.000	2 MoU, SPK dan NPHD	103.000.000	3 MoU, SPK dan NPHD	106.090.000	3 MoU, SPK dan NPHD	109.272.700	3 MoU, SPK dan NPHD	112.550.881	13 MoU, SPK dan NPHD	530.913.581	Sub Keg. Baru Kejasama
				4.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	17 Laporan	100.000.000	17 Laporan	103.000.000	23 Laporan	106.090.000	23 Laporan	109.272.700	28 Laporan	112.550.881	108 Laporan	530.913.581	
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel						Nilai LPPD	Nilai	3,275	3,3	3,35		3,4		3,45		3,5		3,55				
Terwujudnya Peningkatan yang efektif, efisien serta akuntabel dalam memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah																						
		Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Mempertajam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Angka Nilai Inflasi Daerah	Nilai	2,5 Nilai	2,5 Nilai	2,5 Nilai	1.400.000.000	3 Nilai	1.442.000.000	3 Nilai	1.485.260.000	3 Nilai	1.529.817.800	3 Nilai	1.575.712.334	3 Nilai	7.432.990.134	
				4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	515.000.000	5 Dokumen	530.450.000	5 Dokumen	546.363.500	5 Dokumen	562.754.405	25 Dokumen	2.654.567.905	
				4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100.000.000	6 Laporan	103.000.000	6 Laporan	106.090.000	6 Laporan	109.272.700	6 Laporan	112.550.881	30 Laporan	530.913.581	Perekonomian
				4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	103.000.000	4 Laporan	106.090.000	4 Laporan	109.272.700	4 Laporan	112.550.881	20 Laporan	530.913.581	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	BAGIAN									
								Kondisi Awal Perencanaan		2022		2023		2024		2025		2026												
								2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)											
				4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil.	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	103.000.000	3 Laporan	106.090.000	3 Laporan	109.272.700	3 Laporan	112.550.881	13 Laporan	530.913.581									
				4.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUKD	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUKD	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	103.000.000	2 Laporan	106.090.000	2 Laporan	109.272.700	2 Laporan	112.550.881	10 Laporan	530.913.581	Sub Keg. Baru Perencanaan								
				4.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUKD	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUKD	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	103.000.000	1 Laporan	106.090.000	1 Laporan	109.272.700	1 Laporan	112.550.881	5 Laporan	530.913.581									
				4.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Administrasi Pembangunan	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	309.000.000	3 Dokumen	318.270.000	3 Dokumen	327.818.100	3 Dokumen	337.652.643	15 Dokumen	1.592.740.743									
				4.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	103.000.000	1 Laporan	106.090.000	1 Laporan	109.272.700	1 Laporan	112.550.881	5 Laporan	530.913.581	Pembangunan								
				4.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	103.000.000	1 Laporan	106.090.000	1 Laporan	109.272.700	1 Laporan	112.550.881	5 Laporan	530.913.581									
				4.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100.000.000	10 Laporan	103.000.000	10 Laporan	106.090.000	10 Laporan	109.272.700	10 Laporan	112.550.881	50 Laporan	530.913.581									
				4.01.03.2.03	Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	309.000.000	3 Dokumen	318.270.000	3 Dokumen	327.818.100	3 Dokumen	337.652.643	15 Dokumen	1.592.740.743									
				4.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	103.000.000	12 Laporan	106.090.000	12 Laporan	109.272.700	12 Laporan	112.550.881	60 Laporan	530.913.581	BPKP								
				4.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	103.000.000	12 Laporan	106.090.000	12 Laporan	109.272.700	12 Laporan	112.550.881	60 Laporan	530.913.581									
				4.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi PBI	Jumlah Laporan Pembinaan dan Advokasi PBI	Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100.000.000	7 Laporan	103.000.000	9 Laporan	106.090.000	6 Laporan	109.272.700	8 Laporan	112.550.881	38 Laporan	530.913.581									
				4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	309.000.000	3 Dokumen	318.270.000	3 Dokumen	327.818.100	3 Dokumen	337.652.643	15 Dokumen	1.592.740.743									
				4.01.03.2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	103.000.000	4 Laporan	106.090.000	4 Laporan	109.272.700	4 Laporan	112.550.881	20 Laporan	530.913.581	SDA								
				4.01.03.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	103.000.000	4 Laporan	106.090.000	4 Laporan	109.272.700	4 Laporan	112.550.881	20 Laporan	530.913.581	Sub Keg. Baru SDA								
				4.01.03.2.04.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	103.000.000	4 Laporan	106.090.000	4 Laporan	109.272.700	4 Laporan	112.550.881	20 Laporan	530.913.581	SDA								
TOTAL PER PROGRAM KESELURUHAN																								74.880.678.370	77.127.098.721	79.440.911.683	81.824.139.033	84.278.863.204	397.551.691.011	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RJPMD

#### Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai AKIP	63.92	65.72	65.72	69	70	73	73
2	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	444	444	464	484	504	524	2420
3	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	1	1	1	1	1	5
4	Jumlah Pegawai	444	464	488	512	536	560	2560
5	Jumlah Laporan	6	6	6	6	6	6	30
6	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	0	17	19	21	23	25	105
7	Laporan Penyedia Jasa	2	2	2	2	2	2	10
8	Laporan Pemeliharaan	4	4	4	4	4	4	20
9	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3	3	3	3	3	3	15
10	Laporan Kebutuhan Rumah Tangga	3	3	3	3	3	3	15
11	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	5	5	5	5	5	5	25
12	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	3	3	3	3	3	15

## Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	3	3	3	3	3	3	15
14	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3	3	3	3	3	3	15
15	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3	3	3	3	3	3	15
16	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	3	3	3	3	3	3	15
17	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5	5	5	5	5	5	25
18	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3	3	3	3	3	3	15
19	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	3	3	3	3	15
20	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	3	3	3	3	3	3	15



## BAB VIII PENUTUP

### A. Kesimpulan

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah tahun 2021 - 2026 memuat hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang yang tercermin dalam sasaran dan indikatornya, dimana perencanaan ini merupakan lanjutan dan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai program Walikota / Wakil Walikota terpilih dan diimplementasikan Sekretaris Daerah yang bertindak sebagai pembantu Walikota/Wakil. Renstra juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Renja yang dibuat setiap tahun dengan memperhatikan pilihan sasaran dan indikator kinerja maupun isu strategis yang ada.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda tahun 2021 - 2026 disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholder serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

### B. Saran

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah tahun 2021 - 2026 yang memiliki visi dan misi dan terjabar dalam sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja dan program /kegiatan yang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun akan datang yang merupakan operasional dari rencana program. Program dan kegiatan juga merupakan keselarasan dari RPJMD Kota Samarinda tahun 2021 - 2026. Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan dan dilaksanakan bersama dari semua pihak akan membantu dan mendorong agar dapat terwujud apa yang telah digariskan dengan baik sehingga diperlukan peran serta aktif seluruh aparatur dan masyarakat untuk berkomitmen membangun dengan harapan *Terciptanya Tatanan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Efektif.*